

PEMBEBASAN – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH – BANGUNAN – MASYARAKAT – BERPENGHASILAN –
RENDAH
2025

PERBUP SEMARANG NO. 1, BD 2025/NO.1, 5 HLM

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK

- Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas nasional berupa pembangunan tiga juta rumah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (4) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk mendukung program prioritas nasional Bupati secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PUPR No.1 Tahun 2021; PERDA KAB SEMARANG No.13 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.87 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengecualian Objek BPHTB Bagi MBR; Kriteria MBR Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan BPHTB; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2024.